

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Feodalisme adalah bagian dari paham kekuasaan dalam kebangsaan dan ketatanegaraan sebagai bentuk politik yang paling besar dan paling tua. Feodalisme ialah paham pertama yang diterapkan manusia atau masyarakat di seluruh dunia dalam bentuk sistem sosial dan pemerintahan kerajaan. Semua masyarakat di dunia tanpa kecuali pada awalnya menggunakan sistem ini. Sebagai bentuk budaya yang terbesar dan tertua, feodalisme merupakan salah satu dari rangkaian sistem sosial yang terjadi di muka bumi. Dalam bentuk sosial dan budaya, kita mengenal tiga macam, yakni sistem sosial masyarakat primitif, sistem sosial masyarakat feodal atau tradisional, dan sistem sosial modern seperti yang sudah banyak diterapkan oleh Sebagian besar bangsa di muka bumi. (Mulya, 2012)

Feodalisme merupakan bagian dari proses evolusi sosial yang dialami semua masyarakat di seluruh dunia. Sebagai bentuk perpindahan dari masyarakat primitif kearah masyarakat modern, yakni dari bentuk masyarakat primitif kemudian berlanjut ke bentuk masyarakat feodal yang kita kenal sebagai masyarakat tradisional, dan selanjutnya ke bentuk masyarakat modern sampai sekarang ini. Namun, dalam masyarakat modern pun masih banyak dan bahkan Sebagian besar masih tetap menerapkan feodalisme dalam berbangsa dan bernegara serta dalam sistem sosialnya. Banyak pihak

mengatakan bahwa feodalisme sangat merugikan Sebagian besar masyarakat atau rakyat.

Kontribusinya juga sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena telah menyimpang dari prinsip-prinsip yang ideal, dalam arti yang baik dan benar. Hal tersebut memang benar adanya karena feodalisme merupakan sebuah paham dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang meletakkan kekuasaan di segala sektor kehidupan kepada sekelompok kecil masyarakat dalam feodalisme kuno mereka adalah kelompok bangsawan. Kekuasaan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut pada umumnya digunakan hanya untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, kemegahan, keagungan, dan kejayaan diri penguasa beserta kelompok atau keluarganya, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk kebesaran dan kejayaan bangsa dan negara.

Rakyat, bangsa, dan negara dipandang hanya sebagai sarana untuk mencapai dan mendapatkan keinginan para penguasa. Rakyat diposisikan sebagai objek penderita dan pihak yang dikorbankan. Paham feodalisme sangat menyengsarakan rakyat secara keseluruhan, merendahkan kualitas bangsa dan negara, serta menuntun ke keterpurukan di masa mendatang. Feodalisme di masa sekarang telah memasuki fase yang sangat canggih dan kompleks, yang biasa kita kenal sebagai bentuk *neofeodalisme*. Di fase ini, feodalisme benar-benar telah menguasai segala sektor kehidupan, di setiap wilayah, dan segenap masyarakatnya. Sangat sulit untuk lepas dari

cengkramannya dan sangat sulit pula untuk dapat melihat bentuk dan sistemnya. (Mulya, 2012)

Bahkan, seseorang yang sebelumnya menjadi korban atau objek penderita sebagai rakyat dapat berubah menjadi seorang feodalis yang fanatik saat ia berhasil memasuki jajaran feodal dan berubah posisi menjadi subjek sebagai bagian dari kekuasaan. Tindak feodalisme ini tidak lepas dari berbagai kepentingan yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja. Kaum bangsawan dan penguasa cenderung memaksakan kehendak mereka tanpa memperdulikan hak-hak pribadi para pekerja dan budaknya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk penindasan yang telah berada pada tingkat akhir. Kepemimpinan birokrasi yang menekankan pada kekuasaan dan didasarkan pada hubungan formalitas sudah tidak relevan lagi karena saat ini tantangan yang dihadapi tidak hanya bersifat integral namun sudah global.

Istilah feodalisme mengarah pada kalangan berkelas atau keluarga kaya, orang yang berpengaruh yang mengarah pada kalangan ningrat atau priyayi di Indonesia. Pemilihan feodalisme dalam judul di atas untuk kajian peneliti karena ingin mengetahui masih adakah sistem feodalisme yang muncul setelah adanya spirit demokrasi yang diterapkan oleh revolusi perancis dan konstitusi amerika dengan jargon *fraternity* (persaudaraan), *equality* dan *freedom* yang menyebutkan bahwa manusia dilahirkan sama dan tanpa kasta. Siapapun berhak dan mendapat kesempatan untuk berkompetisi. Pemimpin feodalisme beranggapan bahwa kekuasaan pemerintahannya berasal dari jabatan, kekayaan, keturunan yang lebih tinggi dari *etete*

(masyarakat biasa), bukan dari masyarakat yang dipimpin. Sumber tersebut bisa berasal dari Tuhan, atasan, atau lembaga yang lebih tinggi daripada lembaga yang dipimpin.

Masyarakat feodal adalah masyarakat yang memiliki bentuk-bentuk sistem sosial yang mana sudah ditentukan oleh pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat feodal adalah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai tradisi, adat-istiadat, dan dalam bentuk budaya-budaya yang lainnya, dalam masyarakat feodal para penguasa feodal membentuk sistem sosial dengan menciptakan tradisi-tradisi dan adat istiadat yang diperkuat dengan legenda-legenda, dan hikayat-hikayat yang menggambarkan bahwa para penguasa (kaum bangsawan) merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan yang mampu menghukum orang-orang yang tidak taat dengan peraturan yang mereka buat.

Contoh masyarakat feodal yaitu , masyarakat yang jika tidak menjalankan tradisi atau peraturan yang sudah dibuat sesuai dengan adat dan tradisi atau mereka tidak hormat kepada penguasa dan leluhur mereka akan mendapatkan hukuman yang berat, bahkan juga berimbas ke masyarakat sekitarnya. Entah dalam bentuk musibah, penyakit atau wabah, yang dianggap sebagai “kualat” yaitu pendaeritaan atau bencana yang yang tak terduga dari akibat melanggar tradisi atau aturan yang sudah dibuat. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi dan adat-istiadat sebagai sistem sosial di dalam masyarakat dapat berlaku sangat efektif, bahkan dalam masyarakat feodalisme modern sekalipun.

Dalam masyarakat feodalisme modern, bentuk dari sistem sosial tersebut sudah mengalami perubahan nilai ke bentuk sistem sosial yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Adat dan tradisi yang berlaku disesuaikan dengan bentuk atau wadah feodalisme yang diberlakukan oleh penguasanya, sedangkan substansinya tetap sama. (Mulya, 2012)

Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam 3 Masa yaitu Masa Republik Indonesia I (Demokrasi Parlemter), Masa Republik Indonesia II (Demokrasi Terpimpin) , dan Masa Republik Indonesia III (Demokrasi Pancasila). Dan sekarang Indonesia sudah memakai sistem demokrasi modern yang mana demokrasi modern adalah bentuk pemerintahan yang mana dalam sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan dan kebebasan memilih dan juga independent yang mana warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. (Noviati, 2013)

Demokrasi modern merupakan gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Dan menurut C.F.Stornq demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Pemilihan umum dalam negara

demokratis tidak lain adalah untuk menentukan kepemimpinan Nasional secara konstitusional. Kepemimpinan Nasional yang dimaksud ialah kepemimpinan yang kolektif yang direfleksikan dalam diri para wakil rakyat.

Oleh sebab itu dalam bentuk dan jenis sistem pemerintahan apapun, pemilu menduduki posisi yang sangat strategis dalam rangkaian melaksanakan tujuan tersebut. Dalam sistem presidensial yang murni, pemilu diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu pertama, untuk menentukan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Kedua untuk menentukan Presiden (Kepala Pemerintahan) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Negara. (Noviati, 2013)

Di dalam sistem parlementer, pemilu pada prinsipnya hanya dilaksanakan satu kali, yakni utamanya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Dan pembentukan parlemen inilah kemudian ditentukan kepala pemerintahan. Penentuan kepala pemerintahan ini biasanya sangat dipengaruhi oleh komposisi perihal suara dari partai politik peserta pemilu. Bagi partai politik yang menduduki komposisi kursi mayoritas, maka diberi kesempatan pertama untuk menentukan komposisi Pemerintahan Negara. Sedangkan jika ternyata dalam pemilu tidak ada satu pun partai politik yang mampu menduduki kursi mayoritas, maka penentuan komposisi pemerintahan Negara dilakukan dengan cara koalisi, yakni bergabungnya dua partai politik atau lebih untuk memperkuat suara di parlemen.

Dengan demikian dalam konteks sistem Parleментар, maka korelasi antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Pemerintahan sifatnya adalah tidak langsung. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Untuk menyelenggarakan pemilihan Umum, termasuk pilkada telah disahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Beberapa peraturan terkait adalah peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung juga telah dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015. Hampir semua daerah di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah, kini telah mengadakan proses pemilihan kepala daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang tersebut. Diaturinya pemilihan kepala daerah adalah bahwa hal tersebut telah menjadi konsensus nasional.

Namun konsensus tersebut bukan tidak memiliki perdebatan berkisar pada kata “Demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, yang membuka multi-fasir, selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah pasal 56 menyebutkan bahwa Kepala Daerah

dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Noor M Aziz, 2009)

Salah satu contoh pemilihan Kepala desa adalah desa harus memenuhi beberapa tahap yakni, tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara yang demokrasi, dan penetapan. Namun di desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim yang mana Desa tersebut berjarak 2 jam dari Kota Muara Enim, dan jalan menuju ke Kota tersebut sudah bagus dan dapat ditempuh dengan transportasi motor, mobil dan transportasi lainnya.

Di desa Pagar Agung itu terdapat perosalan tentang pemilihan Kepala Desa yang mana dalam pemilihan Kepala Desa itu terdapat pemilihan Kepala Desa yang masih menggunakan paham feodalisme yang mana di desa Pagar Agung itu juga sudah menerapkan demokrasi modern dan seharusnya dalam pemilihan Kepala Desa tidak lagi memakai paham feodalisme yang mana dalam pemilihan Kepala Desa itu harus berdasarkan “Demokratis” yang berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Pagar Agung ialah pemilihan yang masih turun temurun yang mana telah disetujui oleh masyarakat tersebut dengan cara disuruh untuk memilih orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam pemilihan kepala desa yang mana calon kepala desanya merupakan keluarga dari kepala desa sebelumnya yang menjadi kepala desa dan kepala desa sebelumnya juga merupakan keluarga dari calon

kepala desa yang akan mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dan itu merupakan paham feodalisme yang mana para penguasa di pemerintah di kuasai oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Seharusnya hal itu sudah tidak terjadi lagi di Era Demokrasi Modern ini tetapi di desa Pagar Agung masih menerapkan Paham tersebut mungkin karena adat-istiadat yang masih kental sehingga hal itu dapat membuat masyarakat di desa Pagar Agung masih menerapkan paham feodalisme

Dari uraian diatas itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019** “.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut “ Bagaimana Perilaku Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini “ Untuk Mengetahui Bagaimana Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019”.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta literatur dalam bidang ilmu politik. Dan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Masyarakat Feodal dan Politik Dinsati dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian diperlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Penelitian pertama, dari Pahrudin (2017), "*Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Palewali Mandar*" Universitas Sulawesi Barat. Penelitian ini menjelaskan menjelaskan bahwa bertahannya dinasti politik di desa Patjiddai dalam jabatan kepala desa pada pemerintahan desa katumbangan karena adanya beberapa faktor pendukung yang sangat kuat dan solid dalam mempertahankan dinasti tersebut, untuk mempertahankan jabatan

sebagai kepala desa, dinasti patjiddai pada proses Pilkades menggerakkan Sumber daya yang benar-benar mendukung dengan sepenuh hati dan faktor ekonomi, serta sumber alam yang dikuasai oleh dinasti patjiddai . keberhasilan dalam mempertahankan dinasti juga ditunjang oleh elit masyarakat desa katumbangan yang berhasil digerakkan untuk tetap mendukung calon dari keluarga patjiddai. (Pahrudin, 2017)

Kedua, dari Fitra Hermansyah (2017), "*Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk*" Universitas Negeri Surabaya. Penelitian menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap politik dinasti Kepala Desa Kepuh. Yang dalam pemilihan Kepala Desa orang yang memahami dinasti politik 80% dan 90% masyarakat yang memahami adanya faktor kuatnya politik dinasti politik yang diakibatkan oleh jaringan kekuasaan pemimpin terdahulu hingga politik balas budi dan politik uang 89% dan masyarakat yang menyadari dampak negatif yang akan ditimbulkan politik dinasti sebesar 70%, dan 68% masyarakat menganggap politik dinasti adalah wajar dan sah. Sehingga Desa Kepuh masih sangat kental akan dinasti politik pada masa Era Demokrasi Modern ini. (Hermansyah, 2017)

Ketiga, dari Nilam Cahyaningtyas (2018), "*Politik Dinasti Di Kabupaten Kediri : Pertukaran Sosial TIM Pemenangan Bupati Haryanti-Masykuri Dengan Warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang*". Universtas Negeri Surabaya. Penelitian menjelaskan bahwa memang ada pertukaran sosial antara pemenang bupati warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang.

Warga memberikan suaranya terhadap pertahanan bahkan mendapat peringkat pertama selama dua periode, pemilu pada tahun 2010 dan 2015 hal ini menjadi indikator pertama bahwa Desa Pare Lor Mendukung adanya politik dinasti.

Dan penelitian ini membuktikan bahwa dinasti politik tidak selalu dimaknai negatif dengan bukti bahwa dari hasil penelitian ini warga Desa Pare Lor cukup mengapresiasi kinerja Bupati Haryanti-Maskuri yang memberikan banyak progress pada infrastruktu di sana. Program yang diberikan juga cukup memberi kemajuan di Desa Pare Lor, contohnya adalah penghijauan, SK-kan, Program GNOTA. Dan penelitian ini membuktikan bahwa dinasti politik dimaknai positif oleh warga Desa Pare Lor Kecamatan Kunjang. (Cahyaningtyas, 2018)

Keempat, dari Nur Hidayati (2014), "*Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia*". universitas Politeknik Negeri Semarang. Penelitian ini menjelaskan praktik kekuasaan dengan membiarkan posisi anggota keluarga dalam struktur kekuasaan sering disebut dengan dinasti politik. Yang mana dinasti politik merupakan realitas yang tak terhindarkan dalam demokrasi. Dan sistem dinasti politik ialah untuk mengakomodasi hubungan yang lebih pribadi tanpa melihat kemampuan, sehingga merusak sistem demokrasi yang ingin kita bangun. Fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan muncul karena demokrasi tidak sehat. Sistem meritokrasi dianggap sangat cocok dengan iklim politik Indonesia. selain meningkatkan keterampilan seorang pemimpin, sistem meritokrasi ini dapat mengikis adanya sistem dinasti. (Hidayanti, 2014)

Kelima, dari Abu Bakar (2013), *“Politik Dinasti Dan Politik Pengalaman DPC PDIP Dan Keluarga Banteng Di Kepulauan Selayar”*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelebagaan partai politik di tingkat lokal dan masalah politik yang terjadi didalam partai politik. Kemudian akan memaparkan bagaimana reikutmen kandidat berjalan secara eksklusif dengan melihat pengalaman DPC PDIP kab. Kepulauan Sealayar dan fakta adanya politik kekerabatan yang terjadi di Kepulauan Selayar. Baik itu hal kekuasaan di dalam internal partai politik maupun eksternal. Misalnya jaringan kelompok terbentuk di pemerintahan yang lebih pada basis kekerabatan. (Bakar, 2013)

Dari keseluruhan penelitian yang telah ditinjau berkaitan dengan masyarakat Feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019. Penelitian tersebut secara sefesifik tidak meneliti tentang masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemiliahhan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019. Adapun yang membedakannya dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang masyarakat feodalisme dan politik dinasti yang terjadi di masyarakat dan penelitian yang akan saya teliti ini lebih fokus pada masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa.

Dengan adanya penelitian masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten

Muara Enim tahun 2009-2014-2019 dapat melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori oligarki sultanistik berdasarkan perilaku masyarakat feodal dan politik dinasti. Yang mana masyarakat feodal itu adalah masyarakat yang tak lain merupakan hasil karya atau buah pemikiran dari manusia dalam membentuk sistem kekuasaan, namun disini masyarakat feodalisme dalam hal ini merupakan masyarakat yang utama dalam struktur kebudayaan dan pemerintahan karena posisinya sebagai induk dari berbagai budaya atau dengan kata lain feodalisme ini merupakan induk yang mengeluarkan budaya-budaya atau tradisi yang lainnya. Seperti di desa Pagar Agung tradisi dan budayanya masih sangat dipegang erat jika tidak memegang adat dan tradisi tersebut akan mendapatkan kesialan.

Sedangkan politik dinasti adalah perebutan kekuasaan dari regional hingga nasional yang tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Oligarki atau kekuasaan ditubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan para penguasa, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integrasi calon. Berdasarkan paparan diatas peneliti akan menggunakan teori oligarki sultanistik dalam menganalisa masyarakat feodalisme dan politik dinasti di desa Pagar Agung.

Teori yang Digunakan dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa Pagar agung tahun 2006-2014-2019 yang mana dalam pemilihan Kepala Desa di desa Pagar agung masih menggunakan paham feodalisme dan dinasti politik, yang mana dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung masih turun temurun dan itu disebut politik dinasti. Masyarakat feodalisme ini adalah masyarakat yang masih memegang tradisi-tradisi dan adat istiadat dalam mempertahankan kekuasaannya. Supaya kekuasaan di desa Pagar Agung itu berada dalam sekelompok orang yang masih satu keluarga. Dan fenomenal seperti ini kalau dalam ilmu politik ini persoalan oligarki yang mana kekuasaan dipegang, dikendalikan, dikuasai oleh sekelompok orang.

Persoalan masyarakat feodal dan politik dinasti ini adalah pada dasarnya persoalan kekuasaan jadi untuk menganalisa ini dilihat dari sudut pandang kekuasaan dan untuk yang seperti ini dalam ilmu politik masuk kedalam pembahasan oligarki dimana sebuah kekuasaan dipegang dan dikendalikan oleh satu keluarga dimana seharusnya dalam pemilihan Kepala Desa itu harus berdasarkan azas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

Karena di Desa Pagar Agung itu sudah menerapkan Demokrasi modern dan dalam pemilihan Presiden, Bupati, Walikota dan DPRD sudah menerapkan demokrasi modern, tapi dalam pemilihan Kepala Desa masih kembali memakai paham feodalisme untuk mempertahankan politik

dinasti di desa Pagar Agung itu. Sehingga peneliti akan menganalisa perilaku masyarakat feodal dan politik dinasti menggunakan teori oligarki.

Dalam kajian mengenai oligarki kekuasaan maka teori yang digunakan adalah teori oligarki, teori oligarki ini adalah teori yang menjelaskan beberapa teka-teki besar untuk mempertahankan dan pelaku yang menguasai dan mengendalikan kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan dan posisi sosial secara eksklusif. Misalnya, di Indonesia marak pandangan bahwa keadaan sudah banyak berubah sejak kejatuhan Suharto pada 1998, namun sebenarnya keadaannya nyaris tidak berubah dan hal ini sama dengan keadaan yang terjadi di desa Pagar Agung yang mana sudah memakai demokrasi modern dalam pemilu namun dalam pemilihan Kepala Desa masih memakai paham feodalisme dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa.

Jeffrey Winters menguraikan oligarki secara detail berdasarkan jenis-jenis praktik oligarki yaitu :

- a. Oligarki panglima, adalah oligarki yang muncul dengan kekuasaan pemaksa (kekerasan) secara langsung yang ada pada dirinya. Teori ini memiliki tentara dan berebut secara langsung dengan oligarki lain. Oligarki panglima ini terjadi di masa pra sejarah, eropa, dan berakhir dengan perseteruan keluarga.
- b. Oligarki penguasa kolektif, adalah oligarki yang memiliki kekuasaan dan berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki norma atau aturan main.

- c. Oligarki sultanistik adalah oligarki yang dikuasi oleh penguasa utama, sedangkan oligarki lainnya menggantungkan kekuasaannya pada oligarki tunggal. Dan oligarki ini mempertahankan kekuasaan dengan cara kekuasaannya dipertahankan bersama keluarga.
- d. Oligarki sipil, adalah oligarki yang memiliki pertahanan pendapat, maka oligarki ini fokus pada pertahanan pendapat. Oligarki ini juga tidak selalu bersifat demokratis dan melibatkan pemilu. (Winters, 2011)

Sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki sultanistik karena teori inilah teori yang tepat dalam penelitian yang berjudul masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019.

Teori oligarki sultanistik adalah salah satu teori yang membahas kekuasaan yang menguasai daerah masing-masing dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara kekuasaan ini dipertahankan oleh penguasa dan keluarga hal ini sama persis dengan yang terjadi di kesultanan-kesultanan dan dipertahankan secara tersendiri oleh penguasa dan keluarga.

Teori ini menjelaskan oligarki yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang mana masyarakat Indonesia sudah berkembang dari zaman kerajaan dan sekarang sudah berkembang menjadi demokrasi modern, dan dalam demokrasi modern ini masih ada desa yang memakai

sistem yang sama dengan zaman kesultanan itu yang pemilihan kepala desanya masih menerapkan paham feodalisme dan politik dinasti.

Persoalan yang terjadi di desa desa Pagar Agung adalah sebagaimana tercermin dalam teori oligarki sultanistik. Atas dasar inilah maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori oligarki sultanistik yang diuraikan oleh Jeffrey Winters yang mana Jeffrey Winters itu adalah seorang ilmuan Politik, Amerika Serikat Northwestern.

Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena peneliti melihat persoalan yang sama di desa Pagar Agung dengan teori oligarki sultanistik yang mana teorinya membahas kekuasaan yang menguasai desa masing-masing atau daerah masing-masing yang mana penguasanya mempertahankan kekuasaan itu bersama dengan keluarganya sehingga persoalan yang telah saya teliti ini keadaannya sama persis dengan teori oligarki sultanistik, sehingga apa yang telah saya teliti ini sangat tepat apabila dianalisa dengan teori oligarki sultanistik untuk meneliti fenomena yang terjadi di desa Pagar Agung yang mana di desa itu Masih menerapkan paham feodalisme dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa.

1. Teori Oligarki Sultanistik

Jeffrey Winters mengemukakan bahwa Teori Sultanistik Teori atau sultanistik adalah sebagai berikut :

- a. Penguasa Sultanistik memerintah secara pribadi dan mengatur segala hal yang penting dalam politik mereka meningkatkan kekuasaan

kekuasaan dan peraturan dengan menghalangi bukan membangun, lembaga-lembaga independen.

- b. Penguasa Sultanistik mempertahankan kendali strategis atas akses terhadap kekuasaan dan kekayaan dalam menggunakan sumber daya material sebagai bagian penting dasar kekuasaan mereka.
- c. Penguasa Sultanistik mengendalikan kekuasaan pemaksaan di dalam Negara. Penguasaan ini bersifat pribadi, dimana hukum diperlemah dan pemimpin memerintah melalui penggunaan kekuasaan untuk mengendalikan rasa takut dan imbalan. (Winters, 2011)

2. Indikator Oligarki Sultanistik

Oligarki sultanistik itu adalah kekuasaan yang di genggam dan dikendalikan oleh sekelompok orang keluarga dan masyarakat feodal dan politik dinasti itu termasuk kedalam oligarki sultanistik yang mana kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam oligarki karena kedua hal itu merupakan satu kesatuan di dalam kekuasaan. Dan indikator-indikator masyarakat feodal itu adalah seperti berikut ini :

- a. Masih memakai tradisi atau adat-istiadat.
- b. Pemikiran yang masih tertutup.
- c. Menomersatukan keluarga.

Dan indikator-indikator politik dinasti adalah sebagai berikut :

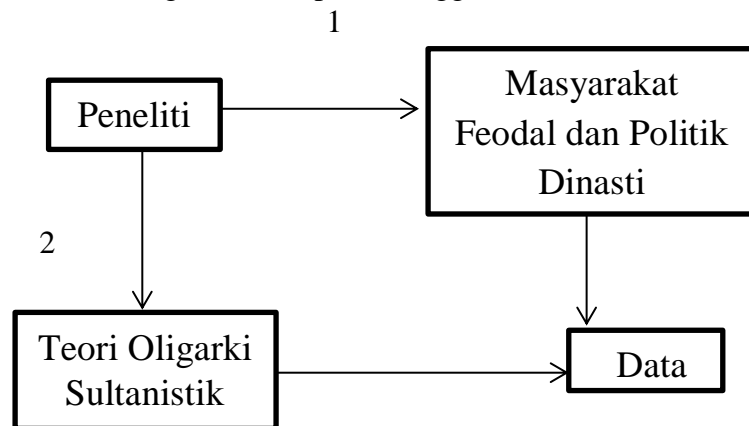
- a. Kekuasaan yang masih turun-temurun.
- b. Kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok orang.
- c. Kekuasaan yang di kendalikan oleh pribadi.

Dari indikator-indikator diatas Peneliti akan menurunkan Indikator-indikator tersebut ke dalam daftar pertanyaan dan akan menjawab rumusan masalah Bagaimana Masyarakat Feodal Dan Politik Dinasti dalam pemilihan Kepala desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019.

3. Penggunaan Teori Oligarki Sultanistik Dalam Penelitian

Tahap pertama Peneliti akan turun kelapangan untuk mencari data masyarakat feodal dan politik dinasti di desa Pagar Agung yang mana di desa itu terdapat fenomenal masyarakat feodal dan sekompok orang dengan politik dinastinya, setelah mendapatkan data dari lapangan peneliti akan menganalisanya menggunakan teori oligarki sultanistik.

Bagan 1. Tahapan I Penggunaan Teori

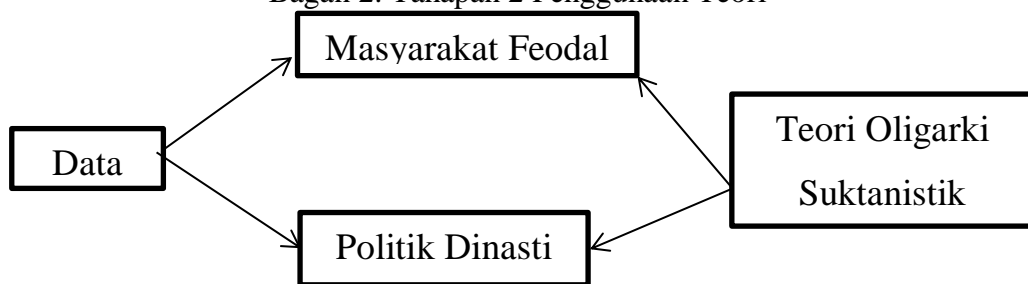


Tahap kedua peneliti akan menjelaskan masyarakat feodal di Desa Pagar Agung yang mana masyarakat feodal di desa Pagar Agung itu adalah masyarakat yang mempertahankan tradisi dan kekuasaan melalui paham feodal yang mana paham feodal itu merupakan paham yang berkembang di masa kesultanan dan itu kembali muncul setelah demokrasi modern di desa Pagar Agung pada pemilihan Kepala Desa. Dan hal itu

sama dengan teori oligarki sultanistik yang mempertahankan kekuasaan dengan cara mengendalikan kekuasaan dengan satu keluarga yang sedang berkuasa.

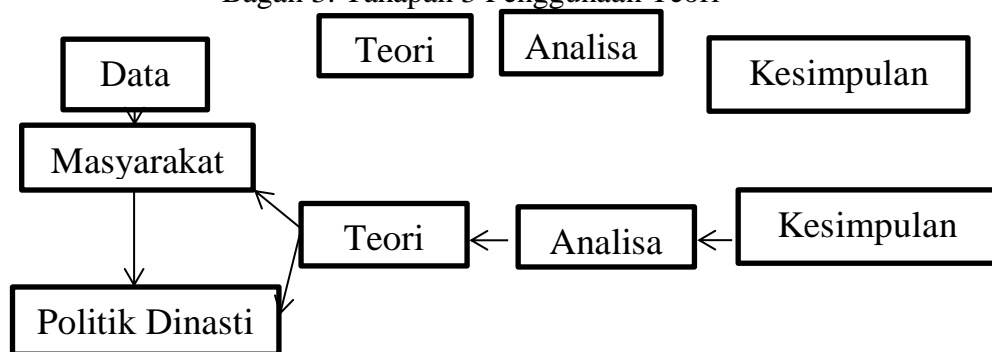
Politik Dinasti yang penguasa sebelumnya merupakan keluarga dari penguasa yang sekarang sedang memimpin desa tersebut, hal itu sama dengan teori oligarki sultanistik yang penguasanya mempertahankan kekuasaan dengan cara kekuasaan itu dikendalikan dan dipegang oleh satu keluarga.

Bagan 2. Tahapan 2 Penggunaan Teori



Tahap ketiga peneliti, setelah mendapatkan data masyarakat feodal dan politik dinasti peneliti akan memakai teori oligarki sultanistik dalam menganalisa data yang di peroleh pada saat turun kelapangan dan menarik kesimpulan dari data yang telah didapat peneliti.

Bagan 3. Tahapan 3 Penggunaan Teori



Berdasarkan penjabaran mengenai teori oligarki sultanistik, penelitian yang berjudul masyarakat feodal dan politik dinasti dalam

Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019 akan di teliti menggunakan teori oligarki sultanistik karena dalam malakukan penelitian ini peneliti akan menganalisa perilaku masyarakat feodal dan dinasti politik dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung yang masih memakai paham feodalisme dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009-2014-2019.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti memerlukan cara atau metode yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisa data yang sesuai dengan permasalahan serta dapat dipercaya kebenarannya. Metode dalam teknik penelitian proposal ini sangat diperlukan agar penelitian ini sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam ruang lingkup penelitian skripsi pembahasan mengenai metode penelitian dalam penelitian skripsi ini menggambarkan peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi. Pembahasan mengenai metode penelitian dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Metodelogi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Pof. Djam'an Satori dan Dr. Aan Komariah penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu cara barang atau jasa berupa kejadian atau fenomenal atau gejala sosial yang merupakan

makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat. (Komariah, 2011)

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif sebuah penelitian dibuat dengan tujuan untuk membuat deskripsi yang berisi kutipan-kutipan dari data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan ilustrasi yang utuh dan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan. (Komariah, 2011)

2. Data dan Sumber data

Sumber data ini adalah masyarakat desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim yang berjumlah 35 orang. Jumlah 35 orang ini di dapat dari, bahwa desa pagar agug itu terdapat tujuh dusun dari ke tujuh itu peneliti mangambil lima orang sumber data dari setiap dusun, jadi penentuan 35 orang sumber data ini dengan kriteria dia sudah tiga kali mengikuti pilkades yaitu pada tahun 2009-2014-2019. Jumlah 35 orang sumber data ini dianggap telah mewakili masyarakat desa pagar agung dan dapat menjawab permasalahan peneliti.

Kepada ke 35 orang sumber data peneliti akan mengajukan pertanyaan terkait feodalisme dan politik dinasti di desa Pagar Agung. Jawaban dari pertanyaa-pertanyaan tersebut itulah yang menjadi data

dalam penelitian. Berikut ini tabel dari data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di desa Pagar Agung.

Tabel 1. Data yang Diperoleh

Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Dusun I	3	2	5
Dusun II	2	2	4
Dusun III	3	2	5
Dusun IV	2	4	6
Dusun V	3	2	5
Dusun VI	2	3	5
Dusun VII	4	1	5
Jumlah	19	16	35

Sumber: Hasil wawancara

Setelah itu dari data yang peneliti dapatkan, peneliti akan melakukan pengolahan dan analisis data agar bisa menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu bagaimana masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019.

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan 3 teknik yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk permasalahan yang tidak terjawab dengan hanya wawancara maka peneliti akan melengkapinya dengan observasi dan dokumentasi, dan yang tidak terjawab melalui teknik wawancara maka peneliti pun melengkapinya dengan yang lain yaitu dokumentasi dan observasi, dan pada saat mengumpulkan data melalui dokumentasi yang tidak terjawab melalui dokumentasi maka peneliti akan melengkapinya dengan teknik wawancara dan observasi begitupun melalui observasi jika tidak

terpenuhi melalui observasi maka akan dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data atau sebuah informasi. Menurut Koentjaraningrat wawancara yang dilakukan dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. (Koentjaraningrat, 2014)

Sebelum melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, maka peneliti menggunakan pembicaraan informal terlebih dahulu agar terjalin komunikasi yang baik dan memunculkan timbal balik antara peneliti juga berpegang pada pedoman yang disusun sebelumnya. Pada penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan wawancara yang bersifat terstruktur sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat proses wawancara berlangsung. (Koentjaraningrat, 2014)

Dalam penelitian ini peneliti telah mewawancarai 35 orang (narasumber) kepada 35 orang narasumber tersebut, peneliti akan mengajukan pertanyaan mengenai feodalisme masyarakat Desa Pagar Agung dan Politik dinasti di Desa Pagar Agung

Apabila dari hasil wawancara data yang didapat tidak lengkap maka peneliti akan menggunakan teknik lain, untuk

melengkapai data yang tidak dapat di penuhi dalam teknik wawancara, tekini lain itu adalah Dokumentasi dan Obsevasi.

b. Dokumentasi

Menurut Van Hoven, Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian, dan penyediaan dokumen. (Hoeve, 2007)

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya, monumental dari seseorang. Dokumen yang bebentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain. (Hoeve, 2007, hal 27).

Dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan dokume-dokumen persoalan masyarakat feodal dan politik dinasti, dokumentasi tersebut dapat berupa, foto, surat, dan dokumen yang akan menjadi data dalam penelitian.

Untuk data-data yang tidak didapatkan melalui teknik dokumentasi maka peneliti akan melengkapi dengan menggunakan teknik lainnya yaitu wawancara dan observasi.

c. Observasi

Menurut Muhammad Ilyas Ismail observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian. (Ismail, 2018)

Observasi dalam penelitian ini adalah atau mengobservasi bagaimana aktivitas sehari-hari masyarakat desa Pagar Agung yang terindikasi feodal dan mengobservasi kerabat-kerabat dari Kepala Desa Pagar Agung yang terindikasi politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung pada Tahun 2009-2014-2019, kemudian bagaimana Kepala Desa yang sekarang membagikan jabatan-jabatan kepada Keluarganya.

Jadi apabila data-data tidak dipenuhi melalui teknik observasi maka peneliti akan melengkapi dengan teknik lain yaitu wawancara dan dokumentasi.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah desa pagar agung sebagai tempat penelitian yang berlokasi desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31385. Alasannya karena untuk mengetahui bagaimana masyarakat feodal dan dinasti politik dalam pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019. Karena masyarakat desa Pagar Agung masih menggunakan dan menerapkan paham feodalisme dan politik dinasti di era demokrasi sekarang ini dalam pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian peneliti mengangkat penelitian yang berjudul masyarakat feodal dan politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung kecamatan Rambang kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019, karena peneliti tertarik untuk mengetahui pola perilaku masyarakat feodalisme dan politik dinasti dalam kehidupan bermasyarakat di desa Pagar Agung.

5. Teknik Analisis Data

Tahap pertama dalam teknik analisis data ialah mengelompokkan data yang sudah didapat yang berupa, wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil dan data dokumentasi cuma satu kelompok data dan data hasil wawancara dengan masyarakat feodal dan politik dinasti, Kemudian data hasil observasi itu adalah data untuk memperkuat kalau dokumen-dokumen

tidak ada. Dan itulah yang disebut reduksi data atau pengelompokan data untuk mendapatkan informasi yang relevan.

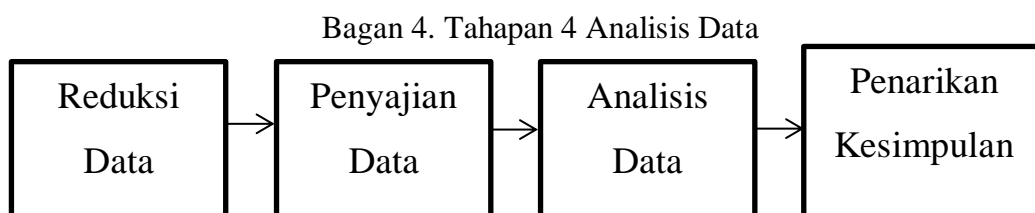
Tahap kedua, sesudah data-data itu dikelompokkan masing-masing, peneliti akan melakukan analisa terhadap data tersebut yang diurutkan berdasarkan kelompok-kelompok tadi, yang pertama peneliti akan menganalisa data-data hasil dokumentasi sistem pemerintahan Desa Pagar Agung, data wawancara dengan masyarakat desa Pagar Agung dan data hasil observasi terhadap masyarakat desa Pagar Agung data- data tersebut peneliti akan menganalisa ketiga data tersebut dengan indikator-indikator teori oligarki sultanistik, kemudian setelah itu peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam penulisan skripsi.

Tahap ketiga peneliti akan melakukan analisis data berdasarkan indikator-indikator masyarakat feodalisme dan politik dinasti yang mana Di lihat dari sudut pandang kekuasaan di desa Pagar Agung masih menerapkan paham feodalisme dan politik dinasti dalam pemilihan Kepala Desa yang mana dalam pemilihan Kepala Desa masih terjadi pemilihan yang turun temurun dari keluarga yang berkuasa terlebih dahulu Yang sudah di sepakati masyarakat dengann cara disuruh untuk memilih orang-orang yang mempunyai kaitan dengan penguasa terdahulu.

Hal tersebut sama dengan teori oligarki sultanistik yang di jelaskan oleh Jeffery Winters yang mana menurut Jeffrey Winters teori Oligarki Sultanistik adalah teori yang membahas kekuasaan yang

menguasai daerah masing-masing dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara kekuasaan ini dipertahankan oleh penguasa dan keluarga.

Tahap keempat, setelah peneliti melakukan analisa pada keseluruhan data maka peneliti akan melakukan penyimpulan atau menarik kesimpulan dari penarikan kesimpulan tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.



H. Sistematika Penelitian Laporan

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan dalam menyusun penelitian ini maka perlu dikemukakan terlebih dahulu sistematika dan penyusunan secara keseluruhan secara garis besarnya penelitian ini terdiri dari Lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan secara singkat tentang pembahasan yang berhubungan dengan penelitian. Pendahuluan terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah. Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, sistematika penelitian dan daftar pustaka. Bab ini menjadi dasar dalam pembuatan skripsi yang berjudul masyarakat feodal dan politik dinasti dalam pemilihan kepala desa Pagar Agung kabupaten Muara Enim tahun 2009-2014-2019.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Dalam bab ini secara peneliti khusus menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019, berbeda dengan Bab 1 pada bab ini peneliti fokus pada kajian pustaka masalah yang diangkat.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Agung, pada bab ini peneliti akan menganalisa tentang Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil dan data yang telah peneliti dapat dari proses pengumpulan data dan proses analisis data. Penelitian dan pembahasan ini ditentukan dari rumusan masalah dan teorinya. Maka pada bab ini peneliti menyajikan hasil dan pembahasan tentang Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2014-2019.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menyimpulkan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyampaikan saran dari penelitian tentang Masyarakat Feodal dan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2009-2-14-2019.

